

KAMPUS TERPAPAR RADIKALISME

Hanya selang beberapa hari setelah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) merilis sedikitnya tujuh kampus negeri yang terpapar radikalisme versi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kamis (31/5), tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggeledah kampus Universitas Riau (Unri) di Pekanbaru (2/6). Densus menangkap tiga alumni FISIP Unri angkatan 2002-2005 saat melakukan pertemuan di Gelanggang Mahasiswa fakultas setempat.

Tim Densus menemukan dua bom pipa besi, bahan peledak jenis TATP siap pakai, bahan peledak lain seperti pupuk KN03, sulfur, gula serta arang, sepucek senapan angin, satu buah granat tangan rakitan, dua busur panah berikut dengan delapan anak panah. Sesuai dengan keterangan pers yang disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri bahwa

sejumlah bahan peledak tersebut akan dipergunakan untuk melakukan serangan teror di kantor-kantor pemerintah seperti DPR RI dan DPRD.

Realitas tersebut telah mengkonfirmasi bahwa berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center bekerjasama dengan Yayasan Mata Air dengan sasaran 1800 mahasiswa dari 25 universitas unggulan serta 2.400 pelajar yang terdiri dari 1.800 pelajar SMA di Pulau Jawa dan 600 pelajar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta NTB yang dipaparkan (31/10) tahun 2017 lalu, terungkap sedikitnya 17,6 persen mahasiswa dan 15,2 persen pelajar setuju untuk melakukan jihad demi tegaknya khilafah di Indonesia.

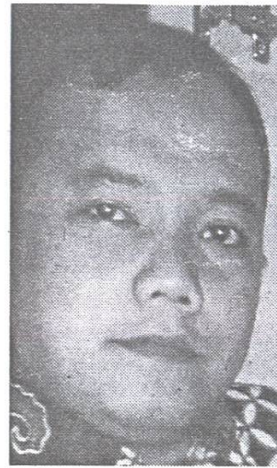
Bahkan 3,8 persen mahasiswa dan 4,8 persen sangat setuju serta 2 persen mahasiswa dan 3,3 persen pelajar sangat setuju sekali. Tentu data tersebut makin mengkhawatirkan, meng-

ingat pelaku peledakan bom bunuh diri di Surabaya beberapa saat lalu juga dilakukan oleh dua laki-laki berstatus pelajar, anak pertama dan kedua dari pasangan Dita dan Puji Kuswati yang juga tewas dalam serangkaian aksi teror berikut dengan dua anak perempuan yang masih belia.

Apa dan bagaimana?

Secara normatif, sekolah dan kampus yang menjadi pusat peradaban ilmu dan ujaran nilai-nilai kebajikan serta kemanusiaan, akhirnya ini mendapat ujian yang cukup serius. Tidak hanya terkait dengan realitas plagiarisme serta berbagai pelanggaran etik dalam dunia akademik, tetapi telah merambah pada wilayah ujaran kebencian (hate speech) bahkan radikalisme yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa Indonesia.

Sejumlah dosen di Perguruan Tinggi (PT) sudah diamankan terkait dengan kicauan hate speech dan pandangan politik yang bias pada sistem khilafah anti Pancasila di akun media



Oleh:

HUTRI AGUSTINO

DOSEN FISIP UNMUH MALANG,
KETUA GPMB KAB MALANG DAN
PENDIRI PONDOK SINAU LENTERA
ANAK NUSANTARA

tidak dilakukan, disusul dengan penangkapan di areal kampus. Rentetan kejadian tersebut menjadi preseden buruk bagi citra dunia pendidikan tinggi yang pada hakikatnya justru diharapkan mampu menjadi benteng strategis selain pesantren dalam mengkonstruksi perwajahan kaum cendekiawan yang moderat, scientific serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Tetapi, saat harapan tersebut masih dalam po-

tengah hegemoni pragmatisme, pada sudut lain hal tersebut justru terdekonstruksi oleh serangkaian pengungkapan fakta radikalisme yang tumbuh dan berkembang di areal kampus. Sebagaimana yang diketahui penulis saat menjadi mahasiswa khususnya pada jenjang S1 beberapa puluh tahun lalu.

Bahwa bibit radikalisme tampak dalam berbagai komunitas mainstream yang biasa melakukan kajian reguler terkait dengan tema-tema seputar politik, demokrasi, kapitalisme dan zionisme yang intinya menilai bahwa ajaran ideologi Barat bahkan sistem demokrasi Pancasila hanya melahirkan berbagai persoalan, mulai dari korupsi sampai pada liberalisasi dalam berbagai bidang.

Maka, kesimpulan tersebut akhirnya menjustifikasi urgensi adopsi sistem politik khilafah yang dianggap lebih mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, gerakan kelompok tersebut sempat merasa 'diatas angin' saat

pat shut down. Sehingga, pilihan atas sistem khilafah seolah menjadi keniscayaan.

Karena komunisme Soviet telah bubar, sedangkan ekonomi negara kapitalis telah ambruk. Tentu, pandangan bahkan konklusi tersebut terlalu sporadis dan menafikan realitas sosio-historis dan multikulturalisme sebagai modal sosial (social capital) bangsa Indonesia. Sampai dengan era revolusi 4.0 saat ini, tidak banyak komunitas bangsa yang jumlahnya lebih dari 250 juta jiwa tersebar di lebih dari 17 ribu pulau dengan 150-an etnik yang berbeda budaya bahkan agama mampu bertahan sampai 72 tahun terhitung sejak kemerdekaan tahun 1945.

Prestasi tersebut tentu tidak terlepas dari Pancasila yang telah menjadi pilihan para pendiri bangsa melalui proses dialektika cukup panjang dan serius. Bahkan, dalam rangka menjaga otentisitas Pancasila dari ancaman ideologi 'kiri' dan 'kanan', Bung Karno rela menjatuhkan hukuman mati pada SM Kartosuwiryo yang

dahal dia adalah salah satu sahabat karib saat sama-sama menjadi anak kos di Gang Peneleh Surabaya rumah HOS Cokroaminoto yang menjadi mentor politik kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya, papara radikalisme yang sudah merambah wilayah kampus tersebut patut mendapat perhatian serius tidak hanya bagi PT tetapi juga para orang tua yang memilih mengkuliahkan anaknya di luar kota bahkan berbed pulau. Nuansa kehidupan kampus yang tampak makin liberal, menjadi peluang bagi tumbuh-kembang berbagai organisasi serta komunitas mahasiswa mulai dari yang sekedar nongkrong dan 'ngopi' sampai pada kelompok yang secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu sensitif yang bisa berujung pada aksi teroris bahkan makar.

Realitas tersebut menuntut peran serius khususnya bidang kemahasiswaan dan bagian pengajaran atau mata kuliah yang terkait dengan materi kewarganegaraan, agama dan politik. Karena disana proses deradika-